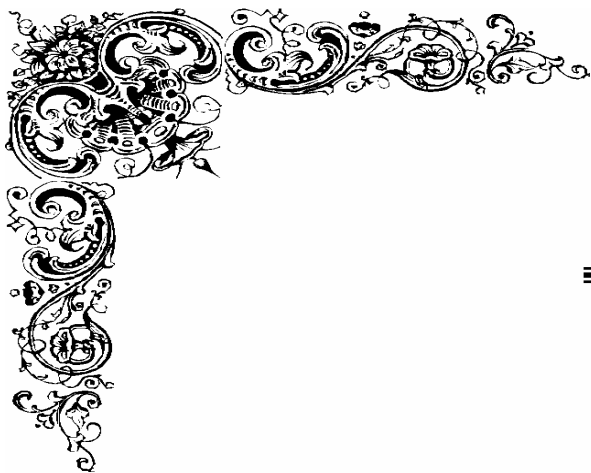
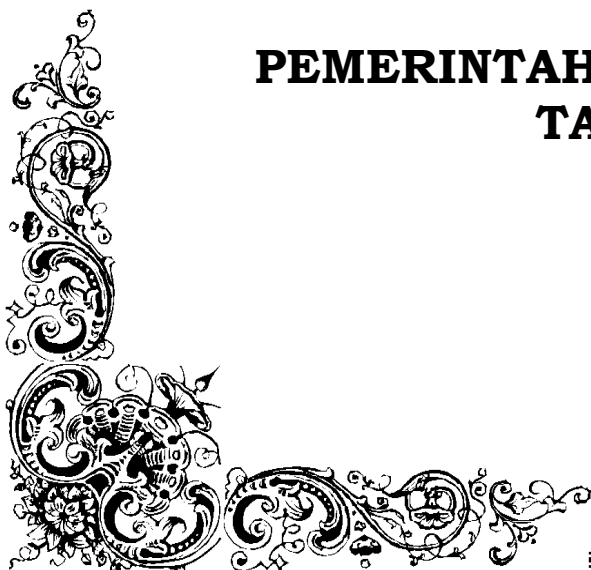




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2026**





Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang e-SAKIP reviu dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026 yang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli nomor 4 tahun 2021, dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli 2025 - 2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli 2025 merupakan periode Masa Transisi dari pelaksanaan RPJMD periode terakhir ke periode awal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dan hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangli tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bangli, 20 Maret 2026

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA, SE.,M.I.Kom



Ikhtisar Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, diujikan dan diandalkan.

Tahun 2025 merupakan masa transisi pelaksanaan Visi Misi Bupati Bangli Era Baru dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026, dengan Visi Bupati Bangli Jengah dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi dan tujuan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bangli.

Visi Kabupaten Bangli merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2021 – 2026 yang berakhir dan dilanjutkan dengan visi misi periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

**MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI
KABUPATEN BANGLI “BANGLI JENGAH”: pesaJE NGayaH**



Misi pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan adanya misi yang jelas dan terukur, diharapkan pembangunan Kabupaten Bangli dalam lima tahun ke depan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan VISI tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi pembangunan sesuai filosofi *Sarining Padma Bhuana* yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bangli sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, yaitu:

- Misi 1 Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
- Misi 2 Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau
- Misi 3 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri
- Misi 4 Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
- Misi 5 Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif



- 6 Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana
- 7 Mewujudkan *Good Governance*
- 8 Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum
- 9 Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi

Dalam RPJMD Kabupaten Bangli terdapat 9 Misi, 4 Tujuan, 17 Sasaran, dengan 42 indikator sasaran, adapun Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 17 sasaran yang mencakup 42 indikator sasaran, di ketahui bahwa rata rata capaian Kinerja per indikator adalah sebesar 94,21% atau dengan predikat kinerja Tinggi. Walau masih ada indikator yang belum direlis capaian kinerjanya.

Jadi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2025 dengan predikat Tinggi atau baik . walaupun masih perlu adanya perbaikan guna mewujudkan Sakip yang lebih baik tahun akan datang.



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat pemerintah Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.



1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik, selain itu LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

1.3. Sejarah Singkat Kabupaten Bangli

Menurut Prasasti Pura Kehen kini tersimpan di Pura Kehen, diceritakan bahwa pada zaman silam di Desa Bangli berkembang wabah penyakit yang disebut kegeringan yang menyebabkan banyak penduduk meninggal. Penduduk lainnya yang masih hidup dan sehat menjadi ketakutan setengah mati, sehingga mereka berbondong-bondong meninggalkan desa guna menghindari wabah tersebut. Akibatnya Desa Bangli menjadi kosong karena tidak ada seorangpun yang berani tinggal disana. Raja Ida Bhatara Guru Sri Adikunti Ketana yang bertahta kala itu dengan segala upaya berusaha mengatasi wabah tersebut. Setelah keadaan pulih kembali sang raja yang kala itu bertahta pada tahun Caka 1126, tanggal 10 tahun Paro Terang, hari pasaran Maula, Kliwon, Chandra (senin), Wuku Klurut tepatnya tanggal 10 Mei 1204, memerintahkan kepada putra-putrinya yang bernama Dhana Dewi Ketu agar mengajak penduduk ke Desa Bangli guna bersama-sama membangun memperbaiki rumahnya masing-masing sekaligus menyelenggarakan upacara/yadnya pada bulan Kasa,



Karo, katiga, Kapat, Kalima, Kalima, Kanem, Kapitu, kaulu, Kasanga, Kadasa, Yjahstha dan Sadha. Disamping itu beliau memerintahkan kepada seluruh penduduk agar menambah keturunan di wilayah Pura Loka Serana di Desa Bangli dan mengizinkan membabat hutan untuk membuat sawah dan saluran air. Untuk itu pada setiap upacara besar penduduk yang ada di Desa Bangli harus sembahyang. Pada saat itu juga, tanggal 10 Mei 1204, Raja Idha Bhatara Guru Sri Adikunti Katana mengucapkan pemastu yaitu: “Barang siapa yang tidak tunduk dan melanggar perintah, semoga orang itu disambar petir tanpa hujan atau mendadak jatuh dari titian tanpa sebab, mata buta tanpa catok, setelah mati arwahnya disiksa oleh Yamabala, dilempar dari langit turun jatuh ke dalam api neraka.”

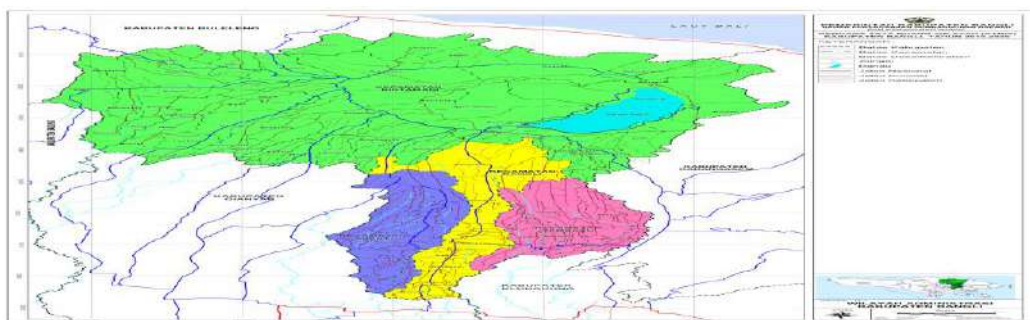
Bertitik tolak dari titah-titah Sang Raja yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1204, maka pada tanggal 10 Mei setiap tahun ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Bangli.

1.4. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1. Batas Administrasi

Kabupaten Bangli memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut : Kabupaten Buleleng (Utara), Kabupaten Karangasem (Timur), Kabupaten Klungkung (Selatan), Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung (Barat).

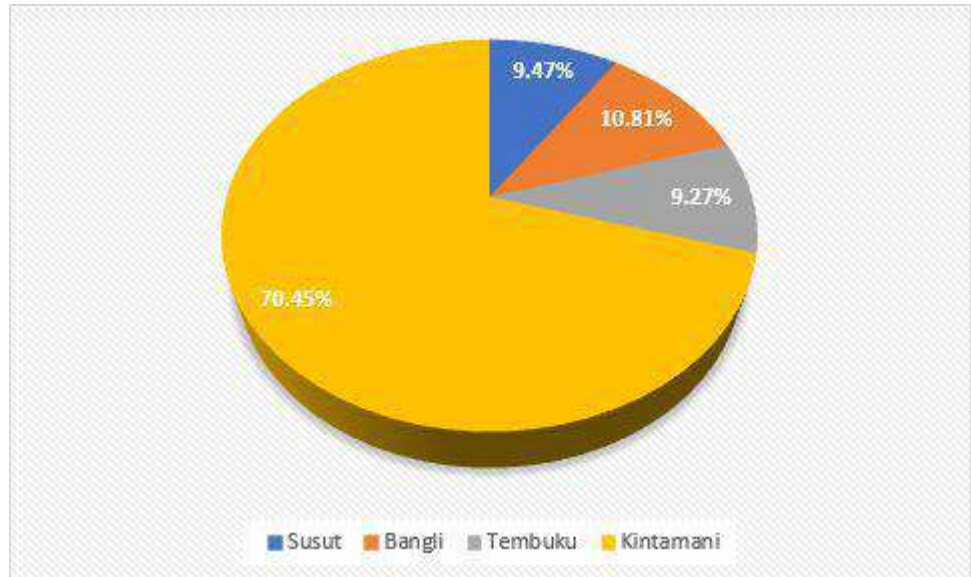
Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Bangli





1.4.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bangli sebesar 520,81 km² atau 9,25 % dari luas wilayah Provinsi Bali



1.4.3. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Bangli berada pada ketinggian antara 100–2.152 mdpl, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Secara umum rentang ketinggian wilayah Kecamatan Susut (225–950 mdpl), Kecamatan Bangli (200–1.175 mdpl), Kecamatan Tembuku (300–891 mdpl) dan Kecamatan Kintamani (100–2.152 mdpl). Kelerengan wilayah bervariasi antar wilayah kecamatan dan secara umum berada pada kondisi dataran sampai landai (0-15 persen) seluas 12,11 persen dari luas wilayah, bergelombang (15-30 persen) seluas 21,70 persen dari luas wilayah, curam (30-40 persen) seluas 18,18 persen dari luas wilayah dan sangat curam (lebih dari 40 persen) seluas 48,01 persen luas wilayah.

Kondisi datar relatif hanya terdapat pada kawasan kaki Gunung Batur, landai dan bergelombang pada wilayah Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku sedangkan bergelombang dan curam serta sangat curam pada wilayah Kecamatan Kintamani. Hidrologi wilayah terdiri dari air



permukaan dan air tanah. Air permukaan terdiri dari Danau Batur dan beberapa sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bangli.

Jumlah potensi mata air di Kabupaten Bangli tersebar di 88 buah titik di 42 desa dengan debit total 1.534,30 ltr/dt. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah umumnya pendek dan jenis alirannya bersifat ephemeral, yang sebagian besar terletak di sebelah Utara, sedangkan yang mengalir ke bagian Selatan lebih panjang, aliran sungainya kebanyakan bersifat perennial. Dilihat dari pembagian wilayah, Bangli hanya memiliki 4 kecamatan dan 72 desa/kelurahan. Bangli bagian utara adalah Kecamatan Kintamani dengan luas 70 persen wilayah Bangli, sedangkan 30 persen luas wilayah lainnya berada pada Bangli bagian selatan yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku. Perbedaan wilayah di Bangli cukup signifikan diikuti perbedaan topografi wilayah, dan iklim yang cukup mencolok. Kecamatan Kintamani memiliki topografi yang bergelombang hingga berbukit, dengan tingkat kemiringan lahan berkisar antara 0 s.d. 60%. Daerah ini terletak berada pada ketinggian 900 s.d. 1.550 mdpl. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Kintamani termasyur dengan hortikultura, dengan produk unggulan kopi arabika, jeruk kintamani dan komoditas yang kini tengah dikembangkan yaitu terong belanda.

1.5. Gambaran Umum Demografi

¶ Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi “beban” pembangunan jika pemberdayaannya tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan, demikian pula bagi Kabupaten Bangli. Sensus Penduduk merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data kependudukan yang pelaksanaannya



dilakukan setiap 10 tahun sekali (setiap tahun yang berakhiran nol). Berdasarkan hasil Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Bangli sebanyak 258.721

jiwa, dengan persebaran penduduk pada Kecamatan Susut sebanyak 8.682 jiwa (18,82 persen), Kecamatan Bangli sebanyak 54.438 jiwa (21,04 persen), Kecamatan Tembuku sebanyak 43.138 jiwa (16,67 persen), dan Kecamatan Kintamani sebanyak 112.463 jiwa (43,47 persen). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli selama tiga tahun dari tahun 2020-2023 sebesar 1,85. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi ada di Kecamatan Tembuku yaitu sebesar 2,26 dan yang paling rendah ada di Kecamatan Susut yaitu sebesar -0,82. Kecamatan Kintamani merupakan daerah yang berpenduduk terbesar dengan jumlah penduduk sekitar 43,47 persen dari seluruh penduduk Bangli

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
per Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2023

Wilayah	Luas (Km2)	Penduduk (Jiwa)	Jiwa/km2
(1)	(2)	(3)	(4)
Susut	49,3	49 2	998,4
Bangli	56,3	54,0	959,8
Tembuku	48,3	43,4	898,1
Kintamani	366,9	110,0	299,8

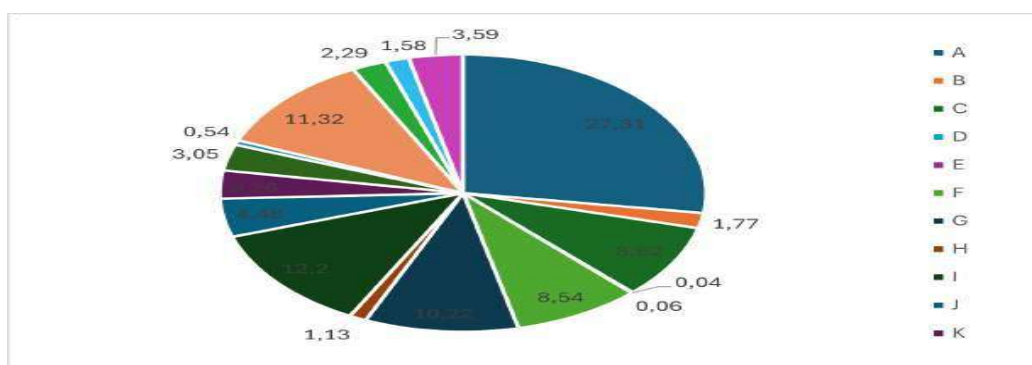
Sumber : Bangli Dalam Angka 2024

1.6. Kondisi Ekonomi Daerah



Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Demikian halnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangli ditunjukkan dengan perkembangan PDRB -nya. Pertumbuhan ekonomi Bangli pada tahun 2023 sebesar 3,5 persen. Strukur ekonomi Kabupaten Bangli ditunjukkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2023 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 2.159,56 miliar rupiah atau sekitar (27,31 persen) dari jumlah total kabupaten sebesar 7.908,31 milyar rupiah. Sektor ini mempengaruhi hampir sepertiga nilai PDRB Kabupaten Bangli. *Gross Regional Domestic Product (GRDP) denotes an illustration of concerning a regional economic circumstance. Such as the trend of economy in Bangli regency which is shown by growth of its GRDP. Cumulatively, Bangli's economic growth in 2023 is 3.5 percent. T*

Gambar .1.2



Distribusi Prosentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Bangli 2023 Sumber (Bangli dalam angka 2024)

1.7. Bidang Kewenangan



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No 10 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas perda 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor : 78 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat, Peraturan Bupati Nomor : 79 tentang Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor : 80 tentang Badan Daerah yang terbagi dalam urusan Wajib dan urusan pilihan meliputi :

- 1 Sekretariat Daerah
- 2 Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
- 3 Inspektorat Daerah
- 4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- 5 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 6 Dinas Kesehatan
- 7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 8 Dinas Perhubungan
- 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
- 12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 13 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 14 Dinas Lingkungan Hidup
- 15 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandialian
- 16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 18 Satuan Polisi Pamong Praja
- 19 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 21 Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran
- 24 Rumah Sakit Umum Daerah Bangli
- 25 Badan Riset dan Inovasi Daerah
- 26 Kecamatan Bangli
- 27 Kecamatan Susut
- 28 Kecamatan Tembuku

**1.8. Jumlah Aparatur Sipil Negara.**

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sangat tergantung Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dengan melalui Penjenjangan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Adapun jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Periode 2025

NO	Jabatan	ASN 2025		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	KONDISI PNS 2025			
	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1		1
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	23	3	26
	Administrator	80	34	114
	Pengawas	68	52	120
	Eselon V	8	5	13
	Jabatan Fungsional Guru	487	487	974
	Jabatan Fungsional Medis	175	478	653
	Jabatan Fungsional Teknis	181	139	320
	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	788	485	1.273
	Jumlah PNS	1.811	1.683	3.494
II	KONDISI PPPK 2025			
	Jabatan Fungsional Guru	243	320	563
	Jabatan Fungsional Medis	20	51	71
	Jabatan Fungsional Teknis	29	1	30
	Jumlah PPPK	292	372	664
	JUMLAH ASN 2025			4.158

1.9. Sistematika Penyajian LKjIP

Bab I : Pendahuluan



Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah Pemerintah Kabupaten Bangli, kondisi geografis, data demografi, serta sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Pengelolaan Kinerja Daerah, Rencana Strategis Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab Bangli

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Sasaran Strategis tahun 2025, juga Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Stratesis yang diuraikan per Sasaran dan Kinerja Keuangan Daerah.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Kabupaten Bangli Tahun Terakhir merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah berakhir tahun 2025 dan dilanjutkan dengan RPJMD 2025-2029 yang disahkan dengan Perda No 3 tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli yang disusun akhir tahun 2025 menyampaikan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah periode awal 2025-2029, dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Penjelasan Visi



Berdasarkan kondisi Kabupaten Bangli dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli SANG NYOMAN SEDANA ARTHA, SE dan I WAYAN DIAR, S.Par membuat Visi Kabupaten Bangli tahun 2025-2029 sebagai berikut:

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BANGLI “BANGLI JENGAH”: pesaJE NGAyaH

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli tersebut di atas memiliki makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bangli beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bangli yang sejahtera dan bahagia, *sekala niskala* menuju kehidupan *krama* dan *gumi* Bangli sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

Bangli Jengah mencerminkan komitmen Kabupaten Bangli untuk terus maju dengan semangat tinggi, menggapai kesejahteraan, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Tekad kolektif dan semangat masyarakat Kabupaten Bangli untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi bangkit dengan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

Jengah adalah istilah dalam budaya Bali yang menggambarkan semangat pantang menyerah dan keinginan kuat untuk berjuang lebih keras.



Ketika masyarakat merasa "*jengah*," mereka merasakan kebanggaan yang mendalam terhadap Bangli sebagai tempat mereka tinggal dan identitas mereka. Dengan "*jengah*," masyarakat merasa bahwa Bangli adalah bagian dari diri mereka, dan karena itu, mereka terdorong untuk bekerja keras, berkolaborasi, dan berinovasi demi kemajuan daerah mereka.

Pesaje Ngayah adalah filosofi hidup yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, pengabdian tanpa pamrih, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. *Ngayah* bukan sekadar tindakan fisik, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, di mana kerja keras dan pengabdian dilihat sebagai bentuk pemujaan atau persembahan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan leluhur. Dari sisi sosial, *Ngayah* memperkuat ikatan antar warga, membangun rasa saling percaya, dan menciptakan solidaritas yang tinggi di dalam masyarakat.

Ngayah berakar pada konsep *Tri Hita Karana* yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Dalam konteks ini, *Ngayah* adalah wujud dari harmoni dan keselarasan sosial, di mana individu memberikan kontribusi mereka demi kesejahteraan bersama.

Kabupaten Bangli terletak di tengah-tengah Pulau Bali. Bangli menjadi sentral atau pusat yang strategis, sebab berada di tengah dari sekian banyak wilayah yang disemayami Pura. Kabupaten Bangli, menjadi ***sarining*** (pusat) ***Padmabhuana*** secara alami dan menjadi representasi



Purusha-Pradhana sebagai cikal bakal kehidupan. Gunung Batur merupakan simbol dari *Purusha* dan Danau Batur, merupakan aspek *Pradhana*. Keduanya bertemu secara alami dan menghasilkan sebuah kehidupan. Secara langsung menjadi penopang kelangsungan entitas dan menjadi pusat kekuatan Bali. Oleh sebab itu pembangunan di Bangli hendaknya mengutamakan dan memperhatikan keagungan, kesucian dan keindahan (*Satyam, Siwam, Sundaram*).

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami untuk membangun kehidupan Masyarakat Bangli secara komprehensif, yaitu :

1. **Krama Bangli/SDM (*Pawongan*)** adalah pembangunan SDM Bangli yang Cerdas (*Pradnyan*) dan Unggul (*Sidha*);
2. **Alam Bangli (*Palemahan*)** adalah pembangunan untuk mewujudkan Bangli yang **BANGLI** (Bersih, Aman, Nyaman, Gairah, Lestari, Indah); dan
3. **Kebudayaan Bangli** yang mencakup agama, tradisi, seni dan adat istiadat (***Parhayangan***).

2.1.2 Pejelasan Misi

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Bangli ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor faktor lingkungan strategis internal dan eksternal.



Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sesuai filosofi Sarining Padmabhuana yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bangli, sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan semesta berencana Yaitu :

- Misi.1.** Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
- Misi.2.** Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, terjangkau
- Misi.3.** Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri
- Misi.4.** Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
- Misi.5.** Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal ekonomi Kreatif
- Misi.6.** Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana
- Misi.7.** Mewujudkan *Good Governance*
- Misi.8.** Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum
- Misi.9.** Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi

2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangli 2025 - 2029 ditetapkan 4 (empat) tujuan , 17 sasaran yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi Kabupaten Bangli

Tujuan	Sasaran	Indikator
-2-	-3-	-4-
Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangli Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kemiskinan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Kabupaten Layak Anak
	Sasaran 1: Meningkatnya Akses Pendidikan, Peran Pemuda dalam literasi Masyarakat Olahraga, dan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan lama sekolah Peningkatan Prestasi Olah Raga Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
	Sasaran 2: Meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)



	Sasaran 4: Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase PMKS yang tertangani
	Sasaran 5: Meningkatkan kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
	Sasaran 6: Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Tujuan 2: Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan budaya		Pertumbuhan Ekonomi
		Gini Rasio
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
		Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal
	Sasaran 7: Meningkatkan Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Sasaran 8: Meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM	Tingkat Produktivitas tenaga kerja
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas
		Rasio Kewirausahaan
	Sasaran 9: Meningkatkan nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB



		Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB
	Sasaran 10: Meningkatnya layanan investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota
Tujuan 3 : Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan	Sasaran 11: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
	Sasaran 12, Meningkatnya pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal	Prosentase Pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota
		Indeks Risiko Bencana (IRB)
		Indeks Infrastruktur Kabupaten
	Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas Air
		Peningkatan Indeks Kualitas udara
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di masyarakat
	Sasaran 15: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian nyaman, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)



Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis		
		Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Daya Saing Daerah
	Sasaran 16: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan akuntabel dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		NILAI AKIP
		Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
	Sasaran 17: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Daerah

2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan



dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan stratejik selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategyfocussed-management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus Pembangunan dan Misi RJMD Kab Bangli. adapun Strategi tahapn pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BANGLI



STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BANGLI

PENAHAPAN	STRATEGI PEMBANGUNAN	KET
TAHAP (I) 2026	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	
TAHAP (II) 2027	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	
TAHAP (III) 2028	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU	
TAHAP (IV) 2029	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	
TAHAP (V) 2030	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU	

Tabel 2.3
Tujuan Prioritas, Strategi, Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Bangli.



MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
Misi 1: Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.	Memastikan keterjangkauan sekolah di daerah yang kekurangan akses pendidikan.	
	Memastikan setiap sekolah memiliki akses internet cepat .	
	Mengembangkan skema subsidi dan beasiswa untuk memastikan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh Masyarakat	
	Memastikan rekrutmen guru berbasis meritokrasi dan kebutuhan daerah.	
	Memastikan setiap guru memiliki jaminan sosial, kesehatan, dan fasilitas pendukung kesejahteraan.	
	Pengembangan Pojok Literasi di ruang-ruang publik	
	Peningkatan Digitalisasi, Perlindungan, dan Penyebarluasan Secara Elektronik Koleksi Literasi Daerah dan nasional	
Misi 2: Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau	Mendorong pembangunan fasilitas kesehatan di daerah yang belum memiliki akses kesehatan yang memadai.	
	Meningkatkan fasilitas kesehatan dengan peralatan medis modern guna meningkatkan kualitas layanan	
	Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN dan memperluas subsidi kesehatan bagi masyarakat miskin.	
	Memastikan adanya aplikasi kesehatan berbasis teknologi untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat.	
	Memastikan imunisasi dasar lengkap dan layanan kesehatan ibu-anak di seluruh daerah.	
	Memastikan proses rekrutmen tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan spesialisasi yang diperlukan.	
	Memastikan adanya fasilitas pendidikan kesehatan guna meningkatkan jumlah tenaga medis.	
	Mendorong forum komunikasi dan edukasi keluarga dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya.	
Misi 3: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri	Meningkatkan produksi tanaman pangan alternatif selain beras	
	Memastikan integrasi pertanian dengan peternakan dan perikanan guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi petani	
	Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal	
	Memastikan adanya kemitraan antara petani, koperasi, dan sektor swasta dalam pemasaran produk deservasi pertanian	
	Memastikan tersedianya alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi produksi.	
	Meningkatkan akses internet dan konektivitas digital di wilayah pertanian.	



	Memastikan kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan lembaga riset dalam pengembangan teknologi pertanian	
	Meningkatkan edukasi petani dalam manajemen usaha tani dan literasi keuangan.	
	Meningkatkan kapasitas kelompok tani dan koperasi pertanian dalam pemasaran dan rantai pasok.	
	Meningkatkan akses petani terhadap kredit usaha tani, asuransi pertanian dan pembiayaan berbasis komonitas	
	Meningkatkan penguatan subak dan sistem irigasi tradisional guna mendukung ketahanan pangan berbasis local	
	Menetapkan rencana tata ruang yang akomodatif terhadap perlindungan lahan-lahan pertanian	
	Mengurangi beban pengeluaran lahan pertanian seperti insentif pajak	
	Mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan industri dan UMKM.	
	Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, industri, dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja baru	
	Mengembangkan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola koperasi guna meningkatkan profesionalisme	
	Mendorong koperasi untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan layanan kepada anggota	
	Memastikan UMKM memiliki standarisasi produk dan sertifikasi guna meningkatkan kepercayaan pasar	
	Mendorong adopsi teknologi produksi modern guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.	
	Meningkatkan pendanaan dan subsidi bagi UMKM yang ingin menembus pasar ekspor.	
	Meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif.	
	Memastikan pengembangan desa kreatif dan klaster ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.	
	Mendorong modernisasi industri kreatif tradisional dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi.	
	Memastikan adanya standarisasi dan sertifikasi produk lokal sesuai regulasi nasional dan internal internasional	
	Mengembangkan gudang logistik dan fasilitas distribusi guna mempercepat perdagangan produk lokal.	
	Meningkatkan kapasitas promosi digital untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor.	
	Memastikan adanya insentif bagi investasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.	
Misi 4: Memperkuat	Memastikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja informal.	



Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Mengembangkan sistem data sosial yang terintegrasi dengan layanan nasional.	
	Memfasilitasi Pelaksanaan Transmigrasi	
	Memperkuat Informasi dan Edukasi tentang Program Transmigrasi	
	Memperkuat Kemitraan dan Kolaborasi Lintas Pihak	
	Mendorong representasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan daerah.	
	Memastikan adanya bantuan hukum dan advokasi bagi kelompok rentan.	
	Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung akses setara terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan	
Misi 5: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif	Memastikan peningkatan kualitas jalan dan aksesibilitas menuju destinasi wisata.	
	Mendorong penggunaan teknologi hijau dalam pengelolaan kawasan wisata.	
	Mengembangkan ekowisata yang mengutamakan konservasi lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal.	
	Mendorong standarisasi pengelolaan wisata agar tetap lestari dan berkelanjutan.	
	Meningkatkan strategi branding wisata Bangli melalui media sosial dan media global.	
	Memastikan adanya digitalisasi dalam layanan wisata guna meningkatkan kenyamanan pengunjung.	
	Mengembangkan paket wisata terpadu melalui kemitraan dengan pelaku industri wisata.	
	Memastikan penyelenggaraan event dan festival wisata yang menarik wisatawan.	
	Memastikan adanya pelatihan hospitality dan customer service berbasis budaya Bali.	
	Mengembangkan program pelatihan manajemen usaha bagi pelaku wisata.	
	Memastikan pengembangan desa kreatif dan klaster ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.	
	Mendorong modernisasi industri kreatif tradisional dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi.	
	Menyelenggarakan pelatihan bisnis kreatif dan digitalisasi bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.	
	Meningkatkan pemanfaatan e-commerce dan platform digital dalam pemasaran produk kreatif.	
	Memastikan dukungan ekspor bagi pelaku ekonomi kreatif lokal.	
	Mengembangkan pedoman tata kelola desa adat dalam sektor pariwisata berbasis kearifan lokal	
	Mendorong kerja sama antara desa adat dan pelaku industri pariwisata dalam memasarkan wisata berbasis budaya	



	Memastikan adanya harmonisasi antara peraturan desa adat dengan kebijakan daerah dalam menjaga keberlanjutan adat dan budaya.	
	Mengoptimalkan pengelolaan aset budaya desa adat agar tetap terjaga dari alih fungsi yang tidak sesuai dengan nilai adat.	
	Mengembangkan arsip digital tentang tradisi, bahasa, dan seni budaya khas Bangli.	
	Memastikan adanya pencatatan dan dokumentasi terhadap prosesi adat dan keagamaan yang masih sesuai dengan nilai adat.	
	Mendorong pembuatan konten digital berbasis budaya guna memperkenalkan adat kepada generasi muda	
Misi 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana	Memastikan adanya kebijakan pengurangan emisi dan limbah	
	Memastikan adanya infrastruktur pengolahan limbah domestik dan industri yang memenuhi standar lingkungan	
	Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan daur ulang sampah.	
	Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.	
	Meningkatkan penghijauan di kawasan perkotaan dan Pariwisata.	
	Memastikan adanya pengawasan terhadap limbah domestik dan non domestik di sungai, mata air, dan danau	
	Mengembangkan awig-awig dalam pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.	
	Menjaga kelestarian Biodiversitas dan Geodiversitas di Kawasan Batur UNESCO Global Geopark	
	Memastikan pembangunan infrastruktur publik yang tahan terhadap gempa, banjir, dan longsor.	
	Mengembangkan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir.	
	Mengembangkan sistem deteksi dini berbasis teknologi untuk berbagai jenis bencana.	
	Mengembangkan program edukasi bencana di sekolah dan komunitas	
	Meningkatkan Pencegahan Bencana Berbasis Pengelolaan Tata Ruang	
Misi 7: Mewujudkan Good Governance	Memastikan penggunaan sistem digital dalam layanan administrasi kependudukan.	
	Mendorong integrasi layanan kependudukan dengan sektor lain untuk meningkatkan efisiensi.	
	Memastikan adanya layanan jemput bola bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.	
	Mengembangkan layanan kependudukan berbasis "One Stop Service" guna mempercepat proses administrasi	



	Mengembangkan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda dan kelompok perempuan di desa.	
	Mengembangkan produk unggulan desa guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal.	
	Mengembangkan pasar desa sebagai pusat ekonomi berbasis lokal.	
	Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.	
	Meningkatkan integrasi data dan sistem antar instansi pemerintahan.	
	Mengoptimalkan sistem arsip elektronik yang terintegrasi dengan instansi terkait.	
	Memastikan adanya sistem pengawasan internal yang transparan dan berbasis teknologi.	
	Mengembangkan sistem anggaran berbasis kinerja guna memastikan efektivitas program pembangunan	
	Menyediakan Rencana Kerja secara Transparan pada masing-masing Alat Kelengkapan DPRD	
	Memastikan integrasi antar dokumen perencanaan	
	Memastikan perencanaan anggaran daerah (APBD) berbasis kinerja dengan indikator capaian yang jelas dan terukur.	
	Memastikan pelatihan dan pendidikan ASN berbasis kompetensi dilakukan secara berkala.	
	Mendorong program beasiswa dan studi lanjut bagi ASN untuk meningkatkan profesionalisme.	
	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan Inovasi dalam kebijakan dan layanan publik.	
	Mengoptimalkan penggunaan AI dan Big Data dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.	
Misi 8: Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum	Meningkatkan peran Satpol PP, pekalang, dan desa adat dalam menjaga ketertiban umum.	
	Mengembangkan program edukasi hukum bagi masyarakat guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi	
	Mendorong peran tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi dalam menyosialisasikan pentingnya demokrasi yang inklusif	
	Meningkatkan peran musyawarah desa dalam menyerap dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal	
Misi 9: Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi	Memastikan pengembangan kawasan permukiman selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).	
	Memastikan pemeliharaan jalan secara rutin untuk meningkatkan kualitas transportasi.	
	Mengembangkan jalan alternatif dan kantong-kantong parkir untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan.	



	Mengembangkan sistem drainase ramah lingkungan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir perkotaan	
	Memastikan tersedianya akses air bersih yang merata di semua kawasan permukiman.	
	Mendorong pengelolaan air terpadu guna menjaga kualitas air tanah dan mengurangi eksploitasi sumber daya air.	
	Mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga berbasis komunitas untuk mengurangi pencemaran lingkungan.	
	Meningkatkan Kawasan Hunian Layak Huni	
	Meningkatkan aksesibilitas transportasi di daerah pedesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi local	
	Memastikan tersedianya jalur transportasi yang menghubungkan kawasan strategis di Bangli.	
	Memastikan tersedianya layanan transportasi publik yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat.	

2.1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang telah dijabarkan dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli lima tahun mendatang, ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja daerah. Dalam hal ini, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi. Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis.

Capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Men Pan RB mengeluarkan Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Adapun indikator yang sasaran RPJMD 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama.



Tujuan	Sasaran	Indikator
-2-	-3-	-4-
Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangli Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kemiskinan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Kabupaten Layak Anak
	Sasaran 1: Meningkatnya Akses Pendidikan, Peran Pemuda dalam literasi Masyarakat Olahraga, dan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan lama sekolah Peningkatan Peningkatan Prestasi Olah Raga Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)



Tujuan 2: Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan budaya	Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase PMKS yang tertangani
	Sasaran 5: Meningkatkan kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
	Sasaran 6: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		Pertumbuhan Ekonomi
		Gini Rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
		Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal
	Sasaran 7: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Sasaran 8: Meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM	Tingkat Produktivitas tenaga kerja
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas Rasio Kewirausahaan
	Sasaran 9: Meningkatkan nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB
		Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB
	Sasaran 10: Meningkatkan layanan investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota
	Sasaran 11: Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum



	Sasaran 12, Meningkatnya pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal	Prosentase Pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal
Tujuan 3 : Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota
		Indeks Risiko Bencana (IRB)
		Indeks Infrastruktur Kabupaten
	Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas Air
		Peningkatan Indeks Kualitas udara
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	Sasaran 14: Memperkuatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di masyarakat
	Sasaran 15: Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian nyaman, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis		Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Daya Saing Daerah
	Sasaran 16: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan akuntabel dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		NILAI AKIP
		Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
	Sasaran 17: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan	Indeks Harmoni Daerah



	Pancasila, demokrasi dan HAM	
--	------------------------------	--

2.1.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

2.1.7 Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun yang dilaporkan adalah target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD masa transisi 2021-2026 dan RPJMD awal 2025-2029 adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Akhir
RPJMD 2025

NO		Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
A	1.1.1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bangli	Ketersediaan Pangan Utama	90,07
			Pola Pangan Harapan	95,7



			Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	28,06
			Penguatan Cadangan Pangan	147,6
			Produktivitas Padi atau Bahan Pangan utama lokal lainnya Perhektar	6,54
			Padi (kw/ha)	51,25
			Jagung (kw/ha)	59,64
			Kedelai (kw/ha)	12,2
			Kacang Tanah (kw/ha)	12,93
			Ubi Kayu (kw/ha)	12,17
			Ubi jalar (kw/ha)	13,11
			Produksi perikanan	3789,9
			Produksi perikanan kelompok nelayan	14
	1.1.2	Meningkatnya industri kerajinan rakyat berbasis budaya dan branding Bangli	Persentase industri kerajinan rakyat berbasis budaya dan branding Bangli	28,08
	1.1.3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bangli memiliki rumah layak huni	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	28,45
	1.1.4	Prosentase transmigrasi yang difasilitasi	Jumlah transmigrasi yang difasilitasi	80
Misi II	2.1.1	Terjaminnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bangli	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	25,54
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	98
	2.1.2	Terjaminnya Mutu Sumber Daya manusia Kesehatan Kabupaten Bangli	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Kesehatan	89
	2.1.3	Meningkatnya cakupan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	98



	2.1.4	Terjaminnya Keamanan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman bagi Krama Bangli	ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	95
Misi III	3.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70,5
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A	87,93
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B	87,61
			Angka partisipasi sekolah (APS) SD/Paket A	88,8
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/Paket B	87,7
		Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam bentuk pesraman	Jumlah siswa SD yang mengikuti pasraman	57,8
			Jumlah Siswa SMP Seluruhnya	66,5
			Jumlah Siswa TK Seluruhnya	50,5
	3.1.3	Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	81,3
	3.1.4	Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan	Meningkatnya persentase partisipasi Kepemudaan	75
	3.1.5	meningkatkan prestasi olahraga	Meningkatnya prosentase perolehan medali	40



Misi 4	4.1.1	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bangli.	Prosentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	21,33
			Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	25,31
	4.1.2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,5
	4.1.3	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	28,53
Misi V	5.1.1	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat dan Subak	Prosentase Lembagas Adat yang memiliki awig awig dan/atau pararem yang berdasarkan nilai-nilai sad kerthi secara tertulis	80,95
			prosentase Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	18,99
	5.1.2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan adat, tradisi, seni dan budaya	Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	123
			jumlah Penyelenggaraan presentasi seni dan budaya	12
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	19,09



Misi VI	6.1.1	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan destinasi pariwisata	Jumlah peningkatan kualitas destinasi pariwisata	4
	6.1.2	Meningkatnya pasar pariwisata di pasar domestik dan global	PAD sektor pariwisata	54630,02
			Lama kunjungan Wisata	3
	6.1.3	Pengembangan ekosistem ekonomi Kreatif	Jumlah rumah kreatif yang terbentuk	4
	6.1.4	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	41
6.2	6.2.1	Meningkatnya Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1050
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam miliaran Rupiah)	1334032,36
	6.2.2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97,53
			Persentase koperasi aktif	83,61
			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,48
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota	13,68
			persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi	100
Misi VII	7.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indek Kepuasan Masyarakat	86,87
			Rasio tindak lanjut layanan pengaduan masyarakat	100



			Meningkatnya Prosentase kepemilikan dokumen Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	90
			Indek Kepuasan Masyarakat	87,97
			Prosentase meningkatnya kepemilikan akta kelahiran	99,5
			Prosentase meningkatnya kepemilikan KTP persatuan penduduk	99,4
			Prosentase meningkatnya bayi yang berakta kelahiran	99,5
			Prosentase meningkatnya kepemilikan akta nikah	61
			Tersedianya database kependudukan berskala nasional	ada
			Telah terlaksananya penerapan KTP Nasional Berbasis Nik	sudah
			Prosentase Meningkatnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,4
			Prosentase Meningkatnya kepemilikan Penerbitan Akta Kelahiran	99,5
			Prosentase kejadian bencana yang tertangani	100
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100



	7.1.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Program RKPD kedalam APBD	100
			Opini BPK	WTP Tepat Waktu
			Penetapan APBD	
			Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	89
			Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti (IKU)	94
			Indeks SPBE	2,9
			Indeks Reformasi Birokrasi	71
			Nilai AKIP	85 sangat tinggi
			Nilai LPPD	
			Nilai MCP	88
			fasilitasi pelayanan keagamaan	100
	7.1.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase PAD terhadap pendapatan	13,96
Misi VIII	8.1.1	Meningkatnya peran serta Krama Bangli dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Angka kriminalitas yang tertangani	0,5
			Prosentase Pemilih Pemula yang terdidik politik	60
			Rasio pendampingan program desa yang baik	52,19
			cakupan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	84,2



			swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	55
Misi IX	9.1.1	Meningkatnya Kualitas Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	indeks infrastruktur kabupaten	83,06
			prosentase sarana dan prasarana publik dalam keadaan baik	58,43
			Ketaatan terhadap RTRW	83,75
	9.1.2	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94,2
			Prosentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45,23
			Jumlah Angkutan orang yang terdistribusi	65500
			Jumlah Angkutan Barang yang terdistribusi	12221
			Prosentase areal kawasan kumuh	1,55
			Prosentase drainase dalam kondisi baik	97,5
	9.1.3	Meningkatnya Layanan Air Bersih dan sanitasi layak	Prosentase penduduk berakses air minum	96,76
			Prosentase rumah tinggal bersanitasi	92,99
	9.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	62,5
			Prosentase jumlah sampah yang tertangani	70

Tabel. 2.6
Rencana Kerja Tahunan sesuai RPJMD awal tahun 2025



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Misi 1 : Memastikan akses yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan	Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangli Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,4
			Tingkat Kemiskinan	4,43
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,97
			Indeks Kabupaten Layak Anak	550 (PRATAMA)
		Sasaran 1: Meningkatnya Akses dalam literasi Masyarakat Olahraga, dan	Rata-rata Lama Sekolah	7,68
			Harapan lama sekolah	12,59
			Peningkatan	
			Peningkatan Prestasi Olah Raga	45
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	61,65
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,6	
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	66.3	
Misi 4: Memperkuat Sistem kesejahteraan		Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaa n masyarakat miskin	Persentase PMKS yang tertangani	40,3



Sosial Terpadu dan inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender		Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100
		Sasaran 6: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.233
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,3
Misi 3: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri	Tujuan 2: Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan budaya		Pertumbuhan Ekonomi	5,5
			Gini Rasio	0.301
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,73
			PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	32,97
			Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	16,05
		Sasaran 7: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77,19
		Sasaran 8: Meningkatnya daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	29,56
			Meningkatnya koperasi yang berkualitas	59.64
			Rasio Kewirausahaan	3.67
		Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	10.20
			Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	8.48
		Sasaran 10: Meningkatnya layanan investasi	Persentase Peningkatan	10



			Investasi di Kabupaten/Kota	
Misi 5: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya		Sasaran 11: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12
		Sasaran 12, Meningkatnya pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal	Prosentase Pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	16,05
Misi 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana	Tujuan 3 : Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	72,83
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	116
			Indeks Infrastruktur Kabupaten	76,57
		Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas Air	71,85
			Peningkatan Indeks Kualitas udara	81,19
			Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,07
		Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di masyarakat	100
Misi 9 : Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi		Sasaran 15: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian nyaman, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,57
Misi 7 : Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola		Indeks Reformasi Birokrasi	75.05
			Indeks Daya Saing Daerah	3,34



Misi 8 : Memperkokoh kehidupan demokrasi dan budaya hukum	Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Sasaran 16: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan akuntabel dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,42
			NILAI AKIP	62,2
			Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	3,4611
		Sasaran 17: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Daerah	6.65

Keberhasilan dan kegagalan atas Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Bangli 2025 didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025 sebesar Rp. 1.318.662.667.137,32



BAB III **Akuntabilitas Kinerja**

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah Daerah Kabupaten Bangli mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan untuk Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Permenpan RB No 3 tahun 2014 tentang e-Sakip reviu dan Tata cara penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli tahun 2025-2029. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2025, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bangli.



Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, Indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bangli.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Tinggi
2	100% s/d 75%	Tinggi
3	75% s/d 55%	Sedang
4	Kurang dari 55%	Rendah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bangli telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli, yang disesuaikan dengan Perda Kabupaten Bangli Nomor 3 tahun



2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Semesta Berencana Kabupten Bangli tahun 2025-2029.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupatten Bangli terdapat 9 Misi, 4 Tujuan, 15 sasaran dan indikator kinerja saaran 42 dengan target target yang di dukung oleh sasaran Strategis setiap Perangkat Daerah telah tercapai sesuai target yang ditentukan dalam capaian sasaran di awal RPJMD sesuai analisis sbb :

Adapun Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 17 sasaran yang mencakup 42 indikator sasaran, di ketahui bahwa rata rata capaian Kinerja per indikator adalah sebesar 94,21% atau dengan predikat kinerja Tinggi.

Dan dibandingkan dengan Hasil analisis capaian kinerja periode akhir RPJMD 2021-2026 adalah rata rata capaian kinerja adalah predikat tinggi atau Baik, walau masih ada capaian belum di relis saat menyusun LKjIP 2025 ini.

Jadi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2025 dengan predikat Tinggi atau baik . walaupun masih perlu adanya perbaikan guna mewujudkan Sakip yang lebih baik tahun akan datang.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Periode akhir RPJMD 2021-2026

NO		Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2025
A	1.1.1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bangli	Ketersediaan Pangan Utama	89,23	84,98	95,24	90,07	90,36	100,32
			Pola Pangan Harapan	95	93,01	97,91	95,7	96,6	100,94
			Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	27,12	belum riilis	belum riilis	28,06	27,31	97,33
			Penguatan Cadangan Pangan	146,3	3,56	2,43	147,6	28,89	19,57
			Produktivitas Padi atau Bahan Pangan utama lokal lainnya Perhektar	6,46	11,4	176,47	6,54	6,36	97,25
			Padi (kw/ha)	5,12	6,39	124,8	51,25	52,23	101,91
			Jagung (kw/ha)	5,96	12,91	216,61	59,64	59,63	99,98
			Kedelai (kw/ha)	1,22	0	0	12,2	0	0,00
			Kacang Tanah (kw/ha)	1,29	4,96	384,5	12,93	10,53	81,44
			Ubi Kayu (kw/ha)	12,16	13,86	113,98	12,17	24,32	199,84
			Ubi jalar (kw/ha)	12,71	30,27	238,16	13,11	12,84	97,94
			Produksi perikanan	3,752,40	4,912,14	130,91	3789,9	4946,74	130,52
			Produksi perikanan kelompok nelayan	13	12,28	94,46	14	12,19	87,07
			Persentase industri kerajinan rakyat berbasis budaya dan branding Bangli	24,22	24,26	24,26	28,08	24,66	87,82
			Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bangli memiliki rumah layak huni	26,41	25,98	98,37	28,45	belum relis	Belum riilis



pu	1.1.4	Prosentase transmigrasi yang difasilitasi	Jumlah transmigrasi yang difasilitasi	100	80,11	100	80	60,52	75,65
Capaian Kinerja Misi I						118,63			86,10
Misi II	2.1.1	Terjaminnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bangli	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	24,92	12,39	150,28	25,54	36,2	141,74
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	98	98,12	100,12	98	164	167,35
	2.1.2	Terjaminnya Mutu Sumber Daya manusia Kesehatan Kabupaten Bangli	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Kesehatan	86	83,33	96,89	89	33,33	37,45
	2.1.3	Meningkatnya cakupan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	98	98,66	100,67	98	99	101,02
	2.1.4	Terjaminnya Keamanan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman bagi Krama Bangli	ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	91	98,61	108,36	95	100	105,26
Capaian Kinerja Misi II						111,26			110,56
Misi III	3.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70,25	70,25	100	70,5	70,5	100,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A	87,91	87,91	100	87,93	91,06	103,56
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B	88,98	88,98	100	87,61	82,75	94,45
			Angka partisipasi sekolah (APS) SD/Paket A	88,71	88,71	100	88,8	91,06	102,55
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/Paket B	87,65	87,65	100	87,7	82,75	94,36



		Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam bentuk pesraman	Jumlah siswa SD yang mengikuti pasraman	47,8	47,8	100	57,8	50,58	87,51
			Jumlah Siswa SMP Seluruhnya	56,5	56,5	100	66,5	66,13	99,44
			Jumlah Siswa TK Seluruhnya	42,1	40	95,01	50,5	50,5	100,00
	3.1.3	Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79,71	74,31	93,23	81,3	belum rilis	Belum rilis
	3.1.4	Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan	Meningkatnya persentase partisipasi Kepemudaan	89	72	80,9	75	65	86,67
	3.1.5	meningkatkan prestasi olahraga	Meningkatnya prosentase perolehan medali	35	35	100	40	40	100,00
Capaian Kinerja Misi III						97,19			88,05
Misi 4	4.1.1	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bangli.	Prosentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	20	20	100	21,33	21,33	100,00
			Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	25,23	25,23	100	25,31	25,31	100,00
	4.1.2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,75	0,75	100	0,5	0,74	148,00
	4.1.3	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	27,87	75,37	270,43	28,53	97,01	340,03
Capaian Kinerja Misi IV						75			172,01



Mi si V	5.1.1	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat dan Subak	Prosentase Lembagas Adat yang memiliki awig awig dan/atau pararem yang berdasarkan nilai-nilai sad kerthi secara tertulis	78,57	78,57	100	80,95	80,95	100,00
			prosentase Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	16,88	16,88	100	18,99	18,99	100,00
	5.1.2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan adat, tradisi, seni dan budaya	Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	101	332	328,71	123	335	272,36
			jumlah Penyelenggaraan presentasi seni dan budaya	10	2	20	12	19	158,33
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	19,04	belum riilis		19,09		0,00
Capaian Kinerja Misi V						109,74			
Mi si VI	6.1.1	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan destinasi pariwisata	Jumlah peningkatan kualitas destinasi pariwisata	4	4	100	4	5	125,00
	6.1.2	Meningkatnya pasar pariwisata di pasar domestik dan global	PAD sektor pariwisata	4966366	4864086	97,94	54630,02	42425,1	77,66
			Lama kunjungan Wisata	3	3	100	3	3	100,00
	6.1.3	Pengembangan ekosistem ekonomi Kreatif	Jumlah rumah kreatif yang terbentuk	3	0	0	4	0	0,00
	6.1.4	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	36	11,91	33,08	41	0	0,00
6.2	6.2.1	Meningkatnya Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	875	4218	482,06	1050	3616	344,38
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam miliaran Rupiah)	850	1249,94	147,05	1334032,36	742,47	0,06



	6.2.2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil	97,52	98,02	100,51	97,53	98,264	100,75
			Prosentase koperasi aktif	83,19	68,31	82,11	83,61	75,39	90,17
			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,22	10,32	464,86	2,48	9,89	398,79
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota	9,25	9,7	9,7	13,68	10,6	77,49
			prosentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi	100	75	75	100	100	100,00
Capaian Kinerja Misi VI						141,03			117,86
Misi VII	7.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indek Kepuasan Masyarakat	86,67	87,29	100,72	86,87	88,22	101,55
			Rasio tindak lanjut layanan pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100,00
			Meningkatnya Prosentase kepemilikan dokumen Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	85	78,37	92,2	90	83,43	92,70
			Indek Kepuasan Masyarakat	87,91	95,34	108,45	87,97	90,14	102,47
			Prosentase meningkatnya kepemilikan akta kelahiran				99,50	98,65	99,15
			Prosentase meningkatnya kepemilikan KTP persatuan penduduk	78,5	74,89	95,4	99,40	98,22	98,81
			Prosentase meningkatnya bayi yang berakta kelahiran	7,5	6,48	86,4	99,50	98,65	99,15
			Prosentase meningkatnya kepemilikan akta nikah	65,6	58,47	89,13	61,00	60,79	99,66
			Tersedianya database kependudukan berskala nasional	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
			Telah terlaksananya penerapan KTP Nasional Berbasis Nik	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah



			Prosentase Meningkatnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,6	97,98	99,37	99,40	98,22	98,81
			Prosentase Meningkatnya kepemilikan Penerbitan Akta Kelahiran	98,4	98,18	99,78	99,50	98,65	99,15
			Prosentase kejadian bencana yang tertangani	100	100	100	100,00	100,00	100,00
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	96,72	96,72	100	100,00	100,00	100,00
	7.1.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Program APBD	100	83,94	83,94	100,00	101,35	101,35
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum relis	Belum rilis
			Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00
			Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	73	67,67	92,7	89,00	83,02	93,28
			Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti (IKU)	92	96,46	104,85	94,00	98,15	104,41
			Indeks SPBE	2,8	2,71	100	2,90	2,79	96,21
			Indeks Reformasi Birokrasi	69	belum rilis		71,00	74,82	99,10
			Nilai AKIP	82	61,28	74,73	85,00	62,90	74,00
			Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100	sangat tinggi	tinggi	tinggi
			Nilai MCP	87,00	95,78	110,09	88,00	90,85	103,24
			fasilitasi pelayanan keagamaan	100	63,1	100	100,00	81,47	81,47
	7.1.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase PAD terhadap pendapatan	13,69	17,04	124,47	13,96	10,18	72,92



Capaian Kinerja Misi VII						79,33			121,52
Misi VII I	8.1.1	Meningkatnya peran serta Krama Bangli dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Angka kriminalitas yang tertangani	0,8	0,8	100	0,50	0,50	100,00
			Prosentase Pemilih Pemula yang terdidik politik	85	85	100	60,00	60,00	100,00
			Rasio pendampingan program desa yang baik	48,67	48,67	100	52,19	52,19	100,00
			cakupan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	84,1	84,1	100	84,20	84,20	100,00
			swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	45	45	100	55	55	100,00
Capaian Kinerja Misi VIII						100			100,00
Misi IX	9.1.1	Meningkatnya Kualitas Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	indeks infrastruktur kabupaten	80,01			83,06	62,78	75,58
			prosentase sarana dan prasarana publik dalam keadaan baik	54,03	54,03	100	58,43	belum reilis	Belum riilis
			Ketaatan terhadap RTRW	73,82	99,63	134,96	83,75	99,53	118,84
	9.1.2	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	89,1	57,55	64,59	94,2	81,75	86,78
			Prosentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43,73	32,59	74,53	45,23	41,53	91,82
			Jumlah Angkutan orang yang terdistribusi	63535	42757	67,3	65500	55521	84,76
			Jumlah Angkutan Barang yang terdistribusi	12013	3170	26,39	12221	3587	29,35
			Prosentase areal kawasan kumuh	1,74	2,6	149,43	1,55	2,6	167,74
			Prosentase drainase dalam kondisi baik	95	95	100	97,5	97,5	100,00



	9.1,3	Meningkatnya Layanan Air Bersih dan sanitasi layak	Prosentase penduduk berakses air minum	93,53	93,61	100,09	96,76	94,21	97,36
			Prosentase rumah tinggal bersanitasi	92,49	93,79	101,41	92,99	93,79	100,86
	9.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	62	68,03	109,73	62,5	76,04	121,66
			Prosentase jumlah sampah yang tertangani	71	96,37	135,73	70	65,09	92,99
Capaian Kinerja Misi IX									89,83

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja RPJMD Awal periode 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	satuan	Base line	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 : Memastikan akses yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan	Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangli Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,51	73,40	73,22	99,75
			Tingkat Kemiskinan	%	5,06	4,43	4,83	91,72
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,6	92,97	93,34	100,69
			Indeks Kabupaten Anak	Predikat	Pratama	550 (PRATAMA)	621	112,91
		Sasaran 1: Meningkatkan Akses Pendidikan Peran Pemuda dalam literasi Masyarakat	Rata-rata Lama sekolah	%	7,58	7,68	7,8	101,56
			Harapan lama sekolah	%	74,23	12,59	12,54	99,60
			Peningkatan prestasi olahraga	%	53	45	44,8	99,56



			Indeks Pembangunan Literasi (IPLM)	Nilai	61,59	61,65	0	0
Misi 2 : Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata dan terjangkau		Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) tahun	%	74,23	74,6	74,6	100,00
		Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Keluarga (Bangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Nilai	65,2	66,3	66,3	100,00
Misi 4: Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu dan inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender		Sasaran 4: Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase PMKS yang tertangani	%	40,2	40,3	49,58	123,03
		Sasaran 5: Meningkatkan kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase Transmigran yang dibangun dan berdayakan	%	100	100		
		Sasaran 6: Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,241	0.233	belum rilis	belum rilis
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	64,24	64,30	70,07	108,97
Misi 3: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri	Tujuan 2: Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan budaya		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,54	5,50	5,31	96,55
			Gini Rasio	%	0,032	0.301	0,263	114,45
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	0,74	0,73	0,74	101,37
			PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	%	32,97	32,97	97,87	296,85
			Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	%	16,05	16,05	16,16	100,69
		Sasaran 7:		Nilai	77,19	77,19	74,17	96,09



		Meningkatny a Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)					
		Sasaran 8: Meningkatny a daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Nilai	28,5	29,56	28,64	96,89
			Meningkatny a koperasi yang berkualitas	%	57,83	59,64	51,27	85,97
			Rasio Kewirausaha an	%	3,65	3,67	3,67	100,00
		Sasaran 9: Meningkatny a nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	%		10,20	belum rilis	belum riilis
			Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%		8,48	belum rilis	belum rilis
		Sasaran 10: Meningkatny a layanan investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/K ota	%	80,38	10	109,8 4	1098,4 0
Misi 5: Mengemban gkan Pariwisata Berkelanjuta n, Pelestarian Budaya		Sasaran 11: Meningkatny a nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	12	12	14,23	118,58
		Sasaran 12, Meningkatny a pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal	Prosentase Pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi local	%	16,05	16,05	16,6	103,43
Misi 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjuta n dan Secara Berkelanjuta n dan Meningkatka n Ketahanan Terhadap Bencana	Tujuan 3 : Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/K ota	indeks	68,03	72,83	76,04	104,41
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	%	117,3 7	116		
			Indeks Infrastruktur Kabupaten	%	75,58	76,57	79,23	103,47
		Sasaran 13: Menurunnya Tingkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Nilai	56,67	71,85	66,67	92,79



		Pencemaran Lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas udara	Nilai	92,7	81,19	93,72	115,43
			Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	41,91	59,07	59,44	100,63
		Sasaran 14: Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di Masyarakat	%	100	100	100	100,00
Misi 9 : Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi		Sasaran 15: Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian nyaman, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	76,57	76,57	79,23	103,47
Misi 7 : Mewujudkan Good Governance	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	74,85	75,05	74,82	99,69
			Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,33	3,34	3,37	100,90
		Sasaran 16: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan akuntabel dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85,4	85,42	86,85	101,67
			NILAI AKIP	nilai	61,28	62,2	62,90	101,13
			Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	nilai	3,46	3,4611	3,7566	108,54
		Sasaran 17: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Daerah	indeks	6,5	6,65	6,65	100
Misi 8 : Memperkokoh kehidupan demokrasi dan budaya hukum								



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 diatas capaian kinerja RPJMD masa akhir RPJMD periode tahun 2021-2026 dan Capaian Kinerja RPJMD awal periode 2025-2029 menunjukkan bahwa hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 17 sasaran yang mencakup 42 indikator sasaran, di ketahui bahwa rata rata capaian Kinerja per indikator adalah sebesar 98,99% atau dengan predikat kinerja Tinggi. Walau masih ada indikator yang belum direlis capaian kinerjanya.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Pencapaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026 yang berakhir 2025 dengan mengawali RPJMD 2025-2029 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.



Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Bangli diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.



- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.318.662.667.137,32 dengan realisasi anggaran Rp. 1.243.578.500.867,98 dengan Capaian efisiensi 5,70% sebesar 12.839.469.842,40 yang merupakan faktor pendukung atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli. Adapun rincian APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kabupaten Bangli
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
PENDAPATAN DAERAH	1.318.662.667.137,32	1.243.578.500.867,98	94,30
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.028.444.139,32	273.038.685.000,69	90,10
Pajak Daerah	93.596.300.000,00	86.520.392.604,00	92,43
Retribusi Daerah	184.361.385.711,34	158.754.438.407,28	86,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.316.100.000,00	6.927.592.452,62	109,68
Lain-lain PAD yang Sah	18.754.658.427,98	20.836.261.536,79	111,09
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	303.028.444.139,32	273.038.685.000,69	90,10



PENDAPATAN TRANSFER	1.015.634.222.998,00	970.461.765.923,00	95,55
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	19.170.837.000,00	19.771.578.400,00	103,13
Dana Alokasi Umum (DAU)	568.870.620.000,00	567.864.640.634,00	99,82
Dana Alokasi Khusus (DAK)	134.729.428.000,00	127.864.666.132,00	94,90
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	722.770.885.000,00	715.500.885.166,00	98,99
Dana Desa	62.508.182.000,00	61.560.309.692,00	98,48
Insentif Fiskal	30.352.227.000,00	30.352.227.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	92.860.409.000,00	91.912.536.692,00	98,97
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.002.928.998,00	163.048.344.065,00	81,52
Pendapatan Bagi Hasil	71.877.326.176,00	68.281.526.191,00	94,99
Bantuan Keuangan	128.125.602.822,00	94.766.817.874,00	73,96
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	200.002.928.998,00	163.048.344.065,00	81,52
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.015.634.222.998,00	970.461.765.923,00	95,55
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	78.049.944,29	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	78.049.944,29	0,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	78.049.944,29	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.318.662.667.137,32	1.243.578.500.867,98	94,30
BELANJA DAERAH	1.319.899.022.848,13	1.232.451.900.196,39	93,37
BELANJA OPERASI	974.492.237.211,89	924.648.261.112,69	94,88
Belanja Pegawai	598.304.468.967,62	578.429.553.018,95	96,67
Belanja Barang dan Jasa	349.491.202.194,27	320.796.009.421,23	91,78
Belanja Bunga	3.439.655.018,00	3.409.362.649,00	99,11
Belanja Hibah	22.817.411.032,00	21.729.736.023,51	95,23
Belanja Bantuan Sosial	439.500.000,00	283.600.000,00	64,52
JUMLAH BELANJA OPERASI	974.492.237.211,89	924.648.261.112,69	94,88



BELANJA MODAL	190.477.718.706,58	159.693.497.896,70	83,83
Belanja Modal Tanah	45.000.000,00	43.354.000,00	96,34
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.989.995.839,58	24.439.132.625,00	87,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.993.239.428,00	31.059.526.638,95	91,36
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.401.490.989,00	101.025.851.772,75	81,20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.517.096.600,00	1.956.274.600,00	77,71
Belanja Modal Aset Lainnya	1.530.895.850,00	1.169.358.260,00	76,38
JUMLAH BELANJA MODAL	190.477.718.706,58	159.693.497.896,70	83,83
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.164.338.329,66	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.164.338.329,66	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.164.338.329,66	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	152.764.728.600,00	148.110.141.187,00	96,95
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.584.200.000,00	4.921.129.203,00	88,12
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.260.970.400,00	4.379.326.092,00	60,31
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	139.919.558.200,00	138.809.685.892,00	99,20
JUMLAH BELANJA TRANSFER	152.764.728.600,00	148.110.141.187,00	96,95
JUMLAH BELANJA	1.319.899.022.848,13	1.232.451.900.196,39	93,37
SURPLUS/DEFISIT	(1.236.355.710,81)	11.126.600.671,59	(899,95)
PEMBIAYAAN DAERAH	1.236.355.710,81	1.712.869.170,81	138,54
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.199.120.370,81	14.675.633.830,81	103,35
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.199.120.370,81	14.099.633.830,81	99,29
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	576.000.000,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.199.120.370,81	14.675.633.830,81	103,35
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.962.764.660,00	12.962.764.660,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	100,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.962.764.660,00	12.962.764.660,00	100,00



PEMBIAYAAN NETTO	1.236.355.710,81	1.712.869.170,81	138,54
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	12.839.469.842,40	0,00

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran per sasaran strategis dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil Analisis Efisiensi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran seperti tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Kinerja RPJMD AWAL 2025-2029

Misi	Sasaran	Indikator	anggaran 2025	realisasi anggaran 2025	% sasaran	Efisiensi
Misi 1 : Memastikan akses yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		Tingkat Kemiskinan	76.328.876.360,00	71.796.590.483,27	94,06	5,04
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	112.520.000,00	95.580.000,00	84,94	15,06
		Indeks Kabupaten Layak Anak	81.419.000,00	79.983.190,00	98,24	1,76
	Sasaran 1: Meningkatnya Akses	Rata-rata Lama Sekolah	33.353.995.000,00	31.466.035.103,00	94,34	5,66
	Pendidikan, Peran Pemuda					



	dalam literasi Masyarakat	Harapan lama sekolah	38.410.200.000,00	37.528.875.570,27	97,71	2,29
		Peningkatan Prestasi Olah Raga	2.308.320.250,00	1.646.949.192,00	71,35	28,65
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	112.932.400,00	111.316.457,00	98,57	1,43
Misi 2 : Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata dan terjangkau	Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	132.428.935.554,30	120.538.924.637,71	91,02	8,98
	Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	4.409.454.000,00	4.127.458.819,00	93,60	6,40
Misi 4: Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu dan inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Sasaran 4: Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase PMKS yang tertangani	402.916.500,00	279.306.221,00	69,32	30,68
	Sasaran 5: Meningkatkan kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase Transmigran yang dibina dan diperdayakan	23.928.750,00	14.480.942,00	60,52	39,48
	Sasaran 6: Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	112.520.000,00	95.580.000,00	84,94	15,06
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	81.419.000,00	79.983.190,00	98,24	1,76
		Pertumbuhan Ekonomi	42.036.196.250,00	37.183.229.294,89	88,46	11,54
		Gini Rasio	42.036.196.250,00	37.183.229.294,89	88,46	11,54
Misi 3: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	172.670.850,00	162.276.307,00	93,98	6,02



		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	730.250.900,00	665.595.812,00	91,15	8,85
		Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	9.847.337.800,00	9.493.101.141,00	96,40	3,60
	Sasaran 7: Meningkatkan Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	32.701.602.700,00	31.612.177.357,00	96,67	3,33
	Sasaran 8: Meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	4.489.340.000,00	3.720.037.332,00	82,86	17,14
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	245.250.000,00	226.619.396,00	92,40	7,60
		Rasio Kewirausahaan	485.000.900,00	438.976.416,00	90,51	9,49
	Sasaran 9: Meningkatkan nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	4.590.922.800,00	3.616.337.883,00	78,77	21,23
		Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4.489.340.000,00	3.720.037.322,00	82,86	17,14
	Sasaran 10: Meningkatkan layanan investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	7.335.004.150,00	6.946.880.482,00	94,71	5,29
Misi 5: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya	Sasaran 11: Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	28.103.900.800,00	23.730.322.121,89	84,44	15,56



	Sasaran 12, Meningkatkan pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal	Prosentase Pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	9.847.337.800,00	9.493.101.141,00	96,40	3,60
Misi 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	516.612.350,00	483.782.212,00	93,65	6,35
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	493.428.000,00	431.151.965,00	87,38	12,62
		Indeks Infrastruktur Kabupaten	143.081.507.756	118.014.416.780	82,48	17,52
	Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas Air	172.204.116,67	161.260.737,33	93,65	6,35
		Peningkatan Indeks Kualitas udara	172.204.119,67	161.260.740,33	93,65	6,35
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	172.204.121,67	161.260.742,33	93,65	6,35
	Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di masyarakat	35.610.000,00	34.892.125,00	97,98	2,02
Misi 9 : Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi	Sasaran 15: Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian nyaman, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	143.081.507.756,00	118.014.416.780,00	82,48	17,52
Misi 7 : Mewujudkan Good Governance		Indeks Reformasi Birokrasi	101.142.850,00	88.301.600,00	87,30	12,70
		Indeks Daya Saing Daerah	114.478.800,00	112.858.498,00	98,58	1,42
	Sasaran 16: Meningkatkan	Indeks Kepuasan	94.504.000,00	74,583,225,00	78,92	21,08



	ya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan akuntabel dalam pelayanan publik	Masyarakat (IKM)				
		NILAI AKIP	101.142.850,00	88.301.600,00	87,30	12,70
		Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	32.532.800,00	28.788.500,00	88,49	11,51
Misi 8 : Memperkokoh kehidupan demokrasi dan budaya hukum	Sasaran 17: Meningkatkan ya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Daerah	6.196.719.432,00	5.940.863.459,00	95,87	4,13

4. Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bangli, terdapat beberapa target indikator kinerja pada sasaran strategis yang tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun selain itu terdapat pula beberapa capaian indikator kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target perlu dianalisis agar dapat merumuskan solusi untuk pencapaian target ke depan. Berikut ringkasan pencapaian target kinerja tahun 2025, analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang dirumuskan dalam mengatasi kegagalan maupun mempertahankan keberhasilan.

**Tabel 3.6****Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Tahun 2025**

Sasaran	Indikator	Base line	Target Tahun 2025	Realisasi	capaian	Aanalisis Keberhasilan/ kegagalan	solusi yang dilakukan
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,40	73,22	99,75	IPM hampir mencapai target 100 persen hal ini menunjukan bahwa peningkatan sumber daya manusia masih perlu di optimalkan.	Perlu fokus pada peningkatan target isu strategis lainnya.
	Tingkat Kemiskinan	5,06	4,43	4,83	91,72	Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dimana Tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli mencapai 5,06% menurun sebesar 0,23% pada tahun 2025 menjadi 4,83%	Intervensi sektoral dan wilayah untuk program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangli kedepannya harus senantiasa difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi dan ekonomi kerakyata serta meningkatkan koordinasi yang sangat baik antara pengambil kebijakan, perencanaan, pelaksanaan ditingkat Perangkat Daerah sampai pada pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,6	92,97	93,34	100,69		
		Pratama	550	621	112,90	Peningkatan Indeks	Perlu dilakukan penguatan



	Indeks Kabupaten Anak		(PRATAMA)			Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak semakin efektif melalui penguatan kebijakan, program lintas sektor, serta keterlibatan pemangku kepentingan.	pelembagaan KLA secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kebijakan, integrasi program di seluruh klaster KLA, serta optimalisasi peran perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar peningkatan indeks dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Sasaran 1:	Rata-rata Lama sekolah	7,58	7,68	7,8	101,56	Infrastruktur yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil, menyulitkan akses fisik ke sekolah	Pembangunan sekolah baru di daerah terpencil atau peningkatan moda transportasi sekolah
Meningkatnya Akses Pendidikan Peran Pemuda dalam literasi Masyarakat	Harapan lama sekolah	74,23	12,59	12,54	99,60	penyebab anak putus sekolah atau tidak lanjut adalah kesulitan ekonomi, di mana anak terpaksa bekerja untuk membantu keluarga.	Adanya bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa untuk siswa miskin mengurangi angka putus sekolah dan mendorong mereka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
	Peningkatan prestasi olahraga	53	45	44,8	99,56	capaian prestasi olahraga adalah hasil kolaborasi antara atlet yang disiplin, pelatih kompeten, dukungan sarana, dan manajemen pemerintah/or ganisasi yang tepat	Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana olahraga, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan meningkatkan pembinaan atlet berprestasi



	Indeks Pembangunan Literasi (IPLM)	61,59	61,65	0	0,00	Nilai IPLM keluar hanya pada lembaga Dinas	Masih dalam proses penataan Kelembagaan Dinas
Sasaran 2:	Usia Harapan Hidup (UHH) tahun	74,23	74,6	74,6	100,00	Adanya kemajuan ekonomi, lingkungan hidup, dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan terutama pada ilmu kedokteran	Peningkatan akses layanan kesehatan, 2. Peningkatan program promosi kesehatan, 3. Pengendalian Penyakit, 4. kerjasama lintas sector
Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	65,2	66,3	66,3	100,00	Target capaian prosentase Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga) dapat terealisasi 100% yang dikarenakan adanya penguatan kordinasi dan rencana kerja program yang sudah didukung oleh kualitas SDM yang memadai	mengingat kompleksitas kegiatan yang semakin padat diperlukan peningkatan kapasitas untuk menjaga kualitas SDM pengampu program agar dapat bekerja sesuai perencanaan dan konsep terkini.
Sasaran 4: Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase PMKS yang tertangani	40,2	40,3	49,58	123,03	Capaian persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bangli sebesar 49,5% telah melampaui target 40,3%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program penanganan sosial, dukungan data yang semakin valid, serta sinergi lintas sektor yang berjalan baik.	Ke depan perlu dilakukan penguatan penanganan berbasis pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan serta pemutakhiran data PMKS secara rutin agar capaian tetap terjaga dan berdampak pada peningkatan kemandirian PMKS.
Sasaran 5: Meningkatkan							



y a kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase Transmigran yang dibina dan di berdayakan	100	100	60,52	60,52	Keberhasilan masyarakat calon tranmigrasi mendapat sosialisasi tetapi belum ada koata keberangkatan tranmigrasi.ya ng ditentukan oleh pusat.	Melaksanakan koordinasi ke Dinas tenaga kerja dan ESDM Prov Bali.
Sasaran 6: Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,241	0.233	belum rilis	belum riilis	capaian IKG belum rilis dari BPS sehingga belum bisa dianalisa keberhasilan/ kegagalannya	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,24	64,3	70,07	108,97	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebesar 70,07 atau 109% dari target 64,30. Keberhasilan ini didukung oleh capaian yang baik pada dimensi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, serta Perlindungan Khusus, melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran UPTD PPA, serta peningkatan sosialisasi perlindungan anak kepada masyarakat. Namun, dimensi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya masih perlu ditingkatkan	Penguatan sinergi dengan perangkat daerah terkait pendidikan dan desa, peningkatan kegiatan ramah anak, optimalisasi layanan UPTD PPA, serta monitoring dan evaluasi capaian IPA secara berkala.



	Pertumbuhan Ekonomi	4,54	5,50	5,31	96,55	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebesar 5,31% menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2024 (4,54%), namun belum mencapai target 5,5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi sudah berjalan baik, tetapi masih menghadapi keterbatasan, antara lain belum optimalnya kontribusi sektor unggulan, keterbatasan investasi, serta daya ungkit sektor pariwisata dan hilirisasi pertanian yang belum maksimal.	Solusi Ke Depan Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih optimal, pemerintah daerah akan memperkuat sektor unggulan (pertanian, pariwisata, dan UMKM), meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendorong hilirisasi produk lokal, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi. Selain itu, penguatan SDM dan inovasi ekonomi berbasis potensi lokal akan terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
	Gini Rasio	0,032	0,301	0,263	87,38	Realisasi Gini Ratio Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebesar 0,263, lebih rendah dari target 0,301, menunjukkan ketimpangan ekonomi semakin menurun dan distribusi pendapatan semakin merata. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan yang inklusif, terutama melalui penguatan sektor pertanian, UMKM, dan	Solusi Ke Depan Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih optimal, pemerintah daerah akan memperkuat sektor unggulan (pertanian, pariwisata, dan UMKM), meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendorong hilirisasi produk lokal, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi. Selain itu, penguatan



						pariwisata berbasis masyarakat yang menjadi karakter ekonomi Bangli.	SDM dan inovasi ekonomi berbasis potensi lokal akan terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. k emiskinan, serta pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,74	0,73	0,74	101,37	Pendidikan dan peningkatan pelatihan vokasi dan dan sektor pariwisata	Ketidaksesuaia n pendidikan dan keterampilan dengan kebutuhan industri dan pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja
	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	32,97	32,97	32,97	100,00	Kenaikan UMK yang berkontribusi pada pekerja dan produktivitas	- Rendahnya kualitas pendidikan/ket erampilan' - Tidak menyerap tenaga kerja lokal karena tidak sesuai kebutuhan industri
	Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	16,05	16,05	16,16	100,69	Analisis keberhasilan dilihat dari a. Program pelestarian dan pengembangan budaya berjalan sesuai rencana b. Pemberdaya an Sanggar Seni: Memperkuat komunitas lokal sebagai pusat pelatihan tari, musik, dan kerajinan tradisional.	1. Penguatan Lembaga Adat: Membina lembaga adat dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa merusak nilai dasar. 2. Festival Budaya: Menyelenggarakan lomba seni, pameran adat, dan festival budaya secara rutin.



Sasaran 7: Meningkatn ya Daya Saing Pertanian lokal untuk daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77,19	77,19	74,17	96,09	Analisis Keberhasilan : Capaian Indeks ketahanan pangan daerah menunjukkan hasil yang relatif baik, keberhasilan tersebut di dukung oleh terjaganya ketersediaan pangan melalui stabilitas produksi komoditas pangan utama, hasil dari dukungan sarana prasarana pertanian, pendampingan teknis serta pelaksanaan program ketahanan pangan yang berkelanjutan Analisi Kegagalan : Produksi pangan daerah masih rentan terhadap faktor external seperti perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, dan kejadian bencana alama yang berdampak pada fluktuasi ketersediaan pangan	Penguatan produksi pangan melalui adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan pemerataan akses panganserta penguatan intervensi pemanfaatn pangan dan gizi masyarakat



Sasaran 8: Meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	28,5	29,56	28,64	96,89	Dukungan fasilitas pelatihan kerja seperti BLK yang siap menerima calon peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang keterampilan tenaga kerja, menambah keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja, pengembangan produktivitas tenaga kerja
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	57,83	59,64	51,27	85,97	Pengalihan sektor usaha yang mengacu kepada kualitas baku lapangan usaha yang belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga mempengaruhi aspek legalitas koperasi.	Meningkatkan penyuluhan koperasi, memohon peningkatan alokasi dana pembinaan koperasi aktif, melakukan Perubahan Anggaran Dasar menyeluruh sehingga terdaftar di Depkumham RI, memperbaharui perijinan, memiliki nomor induk berusaha koperasi
	Rasio Kewirausahaan	3,65	3,67	3,67	100,00	Pengalihan sektor usaha yang mengacu kepada kualitas baku lapangan usaha yang belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga mempengaruhi aspek legalitas koperasi.	Meningkatkan penyuluhan koperasi, memohon peningkatan alokasi dana pembinaan koperasi aktif, melakukan Perubahan Anggaran Dasar menyeluruh sehingga terdaftar di Depkumham RI, memperbaharui perijinan, memiliki nomor induk berusaha koperasi
Sasaran 9: Meningkatkan nilai tambah	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB		10,20	9,93	97,35	masih ketergantungan terhadap sektor	melaksanakan kegiatan operasi pasar guna



perdagangan dan daya saing industri lokal						pariwisata mengakibatkan fluktuasi daya beli masyarakat yang sangat tinggi sebagai penyebab kegagalan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	menstabilkan harga dan sosialisasi untuk tidak tergantung terhadap sektor pariwisata
	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB		8.48	8,00	94,34	masih minimnya sektor industri menggunakan teknologi baru yang mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien dan kurang kompetitif	melaksanakan pelatihan sektor industri terkait peningkatan teknologi agar bisa efisien dan kompetitif
Sasaran 10: Meningkatkan layanan investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	80,38	10	109,84	1098,40	1) Komitmen pimpinan dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara konsisten, yang tercermin dari peningkatan efektivitas pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal. 2) Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat	1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan. 2. Optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik, termasuk perluasan jenis layanan dan peningkatan koordinasi lintas instansi guna menciptakan pelayanan



				layanan terpadu yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan pelayanan perizinan, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor. 3) Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi unggulan daerah yang meskipun belum sepenuhnya optimal, namun telah mampu menarik minat investor dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi daerah. 4) Penyederhanaan regulasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan yang berdampak pada berkurangnya hambatan administratif serta meningkatnya kemudahan	yang semakin terintegrasi dan responsif. 3. Penguatan strategi promosi investasi daerah melalui pemetaan potensi unggulan yang lebih fokus, pemanfaatan media digital, serta peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. 4. Melanjutkan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, khususnya yang berdampak langsung terhadap kemudahan berusaha dan kepastian investasi. 5. Meningkatkan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal secara lebih terstruktur untuk memastikan keberlanjutan realisasi investasi dan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
--	--	--	--	---	--



						berusaha di daerah. 5) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal secara berkelanjutan, yang mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam merealisasikan komitmen investasinya.	
Saran 11: Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12	12	14,23	118,58	Analisis Keberhasilan dapat dilihat dari : Lonjakan okupansi hotel (akomodasi) yang diikuti oleh peningkatan belanja di restoran warung makan. B. Adanya acara besar (event) festival, atau pertemuan berskala nasional/regional di wilayah tersebut yang meningkatkan permintaan jasa akomodasi secara mendadak.	
Sasaran 12, Meningkatkan pelestarian budaya, seni, adat	Prosentase Pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	16,05	16,05	16,6	103,43	Analisis keberhasilan dilihat dari a. Program pelestarian dan pengembangan budaya	1. Penguatan Lembaga Adat: Membina lembaga adat dalam merumuskan kebijakan



dan tradisi lokal						berjalan sesuai rencana b. Pemberdayaan Sanggar Seni: Memperkuat komunitas lokal sebagai pusat pelatihan tari, musik, dan kerajinan tradisional.	yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa merusak nilai dasar. 2. Festival Budaya: Menyelenggarakan lomba seni, pameran adat, dan festival budaya secara rutin.
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	68,03	72,83	76,04	104,41	Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten Bangli mencapai keberhasilan dengan nilai melebihi target yang ditentukan	
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	117,37	116	102,84	0,89	Indeks Risiko Bencana turun dari target, disebabkan karena capaian keberhasilan penurunan resiko bencana	Meningkatkan pemuktahiran data risiko bencana
	Indeks Infrastruktur Kabupaten	75,58	76,57	79,23	103,47	Adanya sinergisitas program kerja daerah dengan program kerja pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku	
Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas Air	56,67	71,85	66,67	92,79	Indeks Kualitas air belum mencapai target yang ditentukan	Melaksanakan pengendalian pencemaran dengan pengolahan limbah industri
	Peningkatan Indeks Kualitas udara	92,7	81,19	93,72	115,43	Indeks kualitas udara mencapai keberhasilan dengan nilai melebihi target yang ditentukan	



	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,91	59,07	59,44	100,63	Indeks Kualitas Tutupan Lahan mencapai keberhasilan dengan nilai melebihi target yang ditentukan	
Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di masyarakat	100	100	100	100,00	Adanya Pelayanan sesuai dengan Laporan kejadian tertangani	
Sasaran 15: Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian nyaman, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,57	76,57	79,23	103,47	Adanya sinergitas program kerja daerah dengan program kerja pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku	
	Indeks Reformasi Birokrasi	74,85	75,05	74,82	99,69	Adanya indikator capai bobot tertinggi dan kegagalannya masih adanya bobot indikator capaian kinerja terendah	Melaksanakan asistensi terhadap indikator yang nilai terendah seperti pembangunan Zona integritas
	Indeks Daya Saing Daerah	3,33	3,34	3,37	100,90	Adanya Kerjasama yang optimal diantara perangkat Daerah terkait dalam pencapaian target IDSD tahun 2025	
Sasaran 16: Meningkatkan tata kelola	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,4	85,42	85	99,51	Belum tercapainya realisasi target yang	Memperkuat sinergi antara bagian organisasi



pemerintahan yang profesional, efektif dan akuntabel dalam pelayanan publik						ditentukan karena ada beberapa perangkat Daerah nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.	dengan PD selaku Pelaksana SKM itu sendiri
	NILAI AKIP	61,28	62,2	62,9	101,13	Implementasi Sakip sudah baik pada pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja	Melaksanakan asistensi terhadap perbaikan indikator dan komitmen dalam manajemen kinerja dengan melaksanakan asistensi manajemen sakip.
	Nilai LPPD (Laporan	3,46	3,4611	3,7566	108,54	Adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan dan penyusunan pelaporan dengan baik	Melakukan review LPPD oleh Inspektorat serta asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi, keandalan, dan validasi data kinerja LPPD
Sasaran 17: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Daerah	6,5	6.65	6,65	100,00	Adanya toleransi kehidupan masyarakat yang harmonis	



5. Program Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bangli, terdapat beberapa program kegiatan yang menunjang dalam pencapaian tersebut. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diharapkan membantu pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan program yang menunjang pencapaian target kinerja pada Kabupaten Bangli.

Tabel 3.7

Analisis Program yang Menunjang Target Kinerja Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		Tingkat Kemiskinan	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
		Indeks Kabupaten Layak Anak	
Sasaran 1:		Rata-rata Lama Sekolah	
Meningkatnya Akses Pendidikan, Peran Pemuda dalam Olah Raga, dan literasi Masyarakat		Harapan lama sekolah	
		Peningkatan Prestasi Olah Raga	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	
	Meningkatnya Partisipasi Anak Sekolah	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan kurikulum
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Program Pengendalian Perizinan pendidikan
	Terlestarikannya Bahasa dan sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan sastra



	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Daya Saing kepemudaan dan wirausaha muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Perolehan Medali (Tingkat Perolehan Medali)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kepramukaan	Program Pengembangan kapasitas kepramukaan
	Meningkatnya Layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno yang Dilestarikan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
Sasaran 2:	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
Meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat		Prevalensi Stunting	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Sasaran 3:		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	



Meningkatnya Kualitas Keluarga	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk
	Meningkatnyapember dayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
	Meningkatnyapember dayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat miskin		Persentase PMKS yang tertangani	
	Meningkatnyapember dayaan sosial	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang berperan aktif dalam Penyelenggara kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
Sasaran 5:	Meningkatnyarehabilit asi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial
Meningkatnyakualita s dan kemandirian masyarakat transmigran			
	Meningkatnyaperlindungan dan jaminan sosial	Persentase KK Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan sosial
	Meningkatnyaperlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana
		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Trasmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Sasaran 6:		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	



	Meningkatnyakualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan
	Meningkatnyakualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif di tingkat Desa	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Meningkatnyapemanfaatan data gender dan anak	Persentase tersedianya data gender pada perangkat daerah	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase lembaga PHA yang berperan aktif dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Meningkatnyapencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapat pendampingan komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak
		Pertumbuhan Ekonomi	
		Gini Rasio	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	
		Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	
Sasaran 7:		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	
Meningkatnya Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah			



	Meningkatnyapengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Infrastruktur Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	Meningkatnyadiversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Meningkatnyapenanganan kerawanan pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Meningkatnyapengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Meningkatnyaproduksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Meningkatnyaproduksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Meningkatnyakonsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatnyadistribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Meningkatnyadistribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Meningkatnyapengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



	Meningkatnyapengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulanga n Bencana pertanian
	Meningkatnyakapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Penyuluhan Pertanian
Sasaran 8:		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	
		Meningkatnyakoperasi yang berkualitas	
Meningkatnyadaya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM		Rasio Kewirausahaan	
	Meningkatnyakualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volumeusahakoperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Meningkatnyapembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksasaan Koperasi
	Meningkatnyakualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan perkoperasian
	Meningkatnyaproduktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Meningkatnyakapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Meningkatnyadaya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan perbankan	Program Pengembangan UMKM
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase penyusunan dokumen rencana tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Meningkatnyaproduktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatnyapenempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja



	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase kepesertaan Jaminan sosial ketenaga kerjaan pada badan usaha	Program Hubungan Industrial
Sasaran 9:		Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	
		Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	
Meningkatnya nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan integrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Terbinanya IKM Sektor Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian perizinan berusaha sektor perindustrian perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Dipantau	Program Pengendalian Izin Usaha Industri



	Meningkatnyapemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Sasaran 10:		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/Kota	
Meningkatnyalayan investasi			
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman modal
	Meningkatnyaperizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman modal
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang tepat waktu dan benar	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Meningkatnyapemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman modal
Sasaran 11:Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Meningkatnyadaya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Meningkatnyajangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Cakupan Promosi Pariwisata yang dilakukan	Program Pemasaran Pariwisata
	Meningkatnyakualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual



	Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sasaran 12:		persentase pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	
Meningkatnya pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal	Meningkatnyaperan serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
	Meningkatnyaperan serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Meningkatnyaakses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah
	Meningkatnyawarisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	
		Indeks Infrastruktur Kabupaten	
		Peningkatan Indeks Kualitas Air	
Sasaran 13:		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan	Meningkatnyaefektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnyakualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan bencana		Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di Masyarakat	
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan,
			Penanggulangan, Penyelamatan
			Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



Sasaran 15: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian layak, serta layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi terampil	Program Pengembangan Jasa Konstruksi



	Meningkatnyakualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
	Meningkatnyakualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman
	Perbaikan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Meningkatnyapenyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Meningkatnyakualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Meningkatnyakualitas layanan transportasi Danau	Persentase Kelengkapan Penyebrangan Sungai dan danau yang telah Terpasang terhadap kondisi idial	Program Pengelolaan Pelayaran
		Indeks Reformasi Birokrasi	
		Indeks Daya Saing Daerah	
Sasaran 16: Meningkatnyatata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		NILAI AKIP	
		Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran penduduk	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
	Meningkatkan Program Pengelolaan Profil kependudukan	Persentase kualitas Penyusunan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan



			Profil Kependudukan
	Meningkatkan Program Pencatatan Sipil	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
	Meningkatkan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Meningkatnyakualitas penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa
	Meningkatnyaefektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	Meningkatnyakualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnyakapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnyajangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Meningkatnyakualitas pengelolaan aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kebijakan internal terkait manajemen data, Arsitektur SPBE dan pembangunan aplikasi layanan OPD, Penerapan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Manajemen Aset TIK, Penggunaan Sistem Penghubung	
		Layanan Pemerintah (SPLP), Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal	
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral



	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (IKAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan informasi
	Meningkatnyatata kelola arsip dinamis dan statis dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Program Pengelolaan Arsip
	Meningkatnyaperlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
	Meningkatnyaakses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Program Perizinan Penggunaan Arsip
	Meningkatnyakualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnyakualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan embangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Meningkatnyakualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Perda dan Ranperda Tahun berkenaan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	meningkatnyakualitas perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia, bidang Infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kuailtas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan dan realisasi belanja daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah



	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Program Kepegawaian Daerah
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan publik
	meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan



	meningkatnyapenangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	meningkatnyastabilitas keamanan lokal	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	meningkatnyakualitas tata kelola pemerintahan desa	cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran 17: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang bermasyarakat yang sesuai ketentuan perundang undangan		Indeks Harmoni Daerah	
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bangli telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya.

Adapun Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 17 sasaran yang mencakup 42 indikator sasaran, di ketahui bahwa rata rata capaian Kinerja per indikator adalah sebesar 94,21% atau dengan predikat kinerja Tinggi.

Dan dibandingkan dengan Hasil analisis capaian kinerja periode akhir RPJMD 2021-2026 adalah rata rata capaian kinerja adalah predikat tinggi atau Baik, dan masih ada capaian belum di relis saat menyusun laporan Kinerja Kabupaten Bangli tahun 2025 ini.

Jadi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2025 dengan predikat Tinggi atau baik . walaupun masih perlu adanya perbaikan guna mewujudkan Sakip yang lebih baik tahun akan datang.

